



Peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dalam Manajemen Bencana di Tanjung Lesung

Syuryansyah ^{1*}, Sukendar ², Ditta Andini ³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 11/06/2023

Received in revised form 14/06/2023

Accepted 15/06/2023

Abstract

Indonesia is a country located in a disaster-prone region. One crucial sector that is vulnerable to disaster threats is the tourism sector. Tanjung Lesung Coastal Area has the potential to attract a significant number of tourists. This research aims to examine the role of the National Disaster Management Agency (BNPB) in handling pre-disaster, during-disaster, and post-disaster situations in Tanjung Lesung. The research design used in this journal is descriptive research, employing a qualitative approach. The data collection technique involves literature study, which includes official documents, books, articles, research reports, and relevant research findings related to the main topic of this study. The results of this research indicate that the BNPB's performance in disaster management, particularly in the pre-disaster phase, is not optimal. Therefore, more serious measures are needed in long-term disaster preparedness to mitigate the impact of disasters that may occur in Tanjung Lesung.

Keywords: Disaster Management, Disaster Mitigation, Hyogo Framework for Action, Tanjung Lesung

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang terletak di daerah rentan bencana. Salah satu sektor yang sangat rentan terhadap ancaman bencana adalah sektor pariwisata. Kawasan Pesisir Tanjung Lesung memiliki potensi untuk menarik jumlah wisatawan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanganan situasi pra-bencana, selama bencana, dan pasca-bencana di Tanjung Lesung. Desain penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melibatkan studi literatur, yang mencakup dokumen resmi, buku, artikel, laporan penelitian, dan temuan penelitian terkait yang relevan dengan topik utama penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja BNPB dalam manajemen bencana, khususnya dalam fase pra-bencana, tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih serius dalam persiapan bencana jangka panjang untuk mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi di Tanjung Lesung.

Kata kunci: Kerangka Kerja Hyogo untuk Aksi, Manajemen Bencana, Mitigasi Bencana, Tanjung Lesung.

^{*)}Penulis Korespondensi

E-mail : syuryansyah@unsera.ac.id

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan suatu aktivitas yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dan memiliki dampak yang beragam terhadap mereka. Suwanto (2013) menjelaskan bahwa wisata alam adalah bentuk pariwisata yang mengoptimalkan sumber daya alam dan lingkungan sebagai potensi. Wisata alam melibatkan objek dan kegiatan yang terkait dengan rekreasi dan pariwisata, yang memanfaatkan sumber daya alam dan ekosistemnya, baik yang masih dalam keadaan asli (alami) maupun yang melibatkan campuran antara sumber daya alam dan tata lingkungan buatan manusia. Sebagai akibatnya, tempat-tempat rekreasi di alam terbuka yang masih mempertahankan keaslian alamnya menjadi semakin populer dan sering dikunjungi oleh wisatawan (Suwanto, 2013).

Pariwisata di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cepat. Indonesia menduduki peringkat ke-9 sebagai negara dengan pertumbuhan pariwisata tercepat di dunia dan menjadi yang terbaik di Asia Tenggara (Council, 2018). Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi dengan banyak objek pariwisata dan budaya yang menarik juga beragam sangat mampu menarik para wisatawan untuk berkunjung ke provinsi Banten (Iwan Sugiwa, 2014). Posisi daerah wisata alam umumnya berada di wilayah rentan, jauh dari pemukiman serta berada di posisi yang keadaan alamnya kurang stabil, sehingga memberikan potensi korban yang dapat diakibatkan dari terbentuknya bencana.

Beberapa kejadian bencana telah menyebabkan dampak bagi industri pariwisata di Indonesia

(Sutrisnawati, 2018). Seperti yang terjadi di Banten, terutama di wilayah yang menjadi posisi tujuan wisata seperti tanjung lesung, yang merupakan salah satu tempat wisata yang rentan bencana. Pada akhir tahun 2018 terjadi tsunami selat sunda yang menyebabkan musibah terbesar terjadi di area wisata. Tsunami selat sunda terjadi akibat pasang besar serta longsor dasar laut dari erupsi Gunung Anak Krakatau, bencana tersebut menimbulkan kerugian ekonomi dan menimbulkan dampak besar berbentuk pembatalan kunjungan wisatawan yang menginap di kawasan wisata (Yuliani, 2018).

Dalam situasi bencana alam, wisatawan rentan terdampak karena mereka memiliki pengetahuan terbatas tentang daerah pariwisata yang mereka kunjungi. Dalam penanganan bencana, diperlukan manajemen bencana jangka panjang yang melibatkan semua elemen dan masyarakat untuk mencegah korban dan kerugian material (Dyahati et al., 2020). Pemerintah, pelaku pariwisata, dan masyarakat setempat perlu bekerja sama dalam memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada wisatawan mengenai potensi risiko bencana di destinasi wisata. Infrastruktur yang tahan bencana, rute evakuasi, titik kumpul yang aman, sistem peringatan dini, dan fasilitas penyelamatan yang memadai juga harus menjadi prioritas (Suppasri et al., 2021). Melibatkan semua elemen dan masyarakat dalam manajemen bencana akan menciptakan lingkungan pariwisata yang lebih aman dan responsif terhadap bencana, memberikan manfaat pada keberlanjutan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat setempat (Uekusa & Matthewman, 2023)

Tsunami Selat Sunda menyebabkan konsekuensi yang merugikan bagi perkembangan salah satu dari 10 destinasi wisata unggulan, yaitu KEK Pariwisata Tanjung Lesung (Bani Adi Darma, 2019). Dampaknya mencakup penurunan jumlah wisatawan, kerusakan pada fasilitas yang mendukung pariwisata, dan yang paling serius adalah keadaan pariwisata di KEK Pariwisata Tanjung Lesung yang menjadi lumpuh, sehingga citra destinasi pariwisata Indonesia terganggu di mata wisatawan internasional (Sintya Nida et al., 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, industri pariwisata global menghadapi ancaman yang meningkat terkait dengan bencana alam. Faulkner (2001) mencatat peningkatan jumlah bencana yang berdampak pada industri pariwisata, baik yang disebabkan oleh kejadian alam maupun kejadian yang dipengaruhi oleh manusia. Bencana alam dapat mengganggu rantai pasokan dan distribusi, bahkan bagi bisnis yang telah siap menghadapinya. Bisnis jasa, termasuk pariwisata, menjadi semakin rentan terhadap gangguan listrik, komunikasi, dan kerusakan infrastruktur kritis lainnya (Lee & Harrald, 1999).

Dari hasil pemetaan riset menunjukkan bahwa manajemen bencana dan ketahanan telah menjadi fokus perhatian dalam upaya melindungi industri pariwisata dari dampak bencana. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menggali aspek-aspek ini, termasuk manajemen bencana dan ketahanan komunitas, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya pengelolaan bencana (Ritchie, 2008).

Namun, belum ada penelitian yang mengidentifikasi peran stakeholder dalam manajemen bencana di Tanjung Lesung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan juga mengidentifikasi

sejauh mana Peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam manajemen bencana pada tahap pra-bencana, saat-bencana, dan pasca-bencana di Tanjung Lesung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang mengacu pada (Nasir, 2014), metode deskriptif digunakan untuk mempelajari status sekelompok manusia, objek, keadaan, sistem pemikiran, atau menggambarkan masalah yang sedang terjadi saat penelitian dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan deskripsi tentang apa yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber pustaka, membaca, mencatat, dan mencerna bahan riset yang relevan. Dalam penelitian ini, studi literatur dilakukan melalui riset kepustakaan menggunakan dokumen-dokumen resmi, buku, artikel, laporan penelitian, dan hasil riset terkait dengan topik utama penelitian ini, yaitu analisis peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam manajemen bencana di Tanjung Lesung. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menganalisis peran BNPB dalam manajemen bencana di Tanjung Lesung.

HASIL DAN DISKUSI

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memiliki visi dan misi ketangguhan bangsa dalam mengalami bencana. Sedangkan misi

BNPB Indonesia ialah : (1) Melindungi negara dari ancaman bencana serta mengadakan pengendalian resiko; (2) Menyediakan prosedur penindakan bencana secara mendalam, efisien serta efektif; (3) Mengadakan rehabilitasi daerah serta warga sesudah musibah lewat pemulihan serta renovasi secara terstruktur serta terukurnya antisipasi bencana; (4) Menyediakan sokongan sertatata laksana logistik serta perlengkapan mengatasi musibah; dan (5) Mengadakan pengendalian bencana secara terbuka menggunakan prinsip *good governance*;

Melalui Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2012, Tanjung Lesung telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, dan pada tanggal 23 Februari 2015, Presiden Joko Widodo secara resmi meresmikannya (Rachman & Syamsudin, 2019). KEK Pariwisata Tanjung Lesung adalah salah satu KEK yang berfokus pada kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Terletak di sebelah barat Pulau Jawa, tepatnya di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten (Sintya Nida et al., 2022). Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung adalah area yang ditetapkan di Provinsi Banten yang telah dikembangkan sebagai tujuan wisata dan pusat ekonomi. Sebagai tempat wisata, Tanjung Lesung menawarkan berbagai atraksi dan kegiatan, termasuk resor pantai, olahraga air, dan pemandangan alam (Ady et al., 2020). Namun, karena terletak di daerah yang rentan terhadap bencana, penting untuk mengakui dan mengatasi risiko potensial yang terkait dengan wilayah tersebut.

Daerah pantai, rentan terhadap tsunami, banjir rob, atau erosi pantai (Nabella et al., 2022). Bencana tiba-tiba ini dapat menimbulkan risiko bagi

keselamatan pengunjung dan keberlanjutan infrastruktur pariwisata (Suroso, 2017). Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi otoritas, komunitas lokal, dan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan Tanjung Lesung untuk menerapkan langkah-langkah efektif dalam mengurangi risiko bencana. Termasuk melakukan penilaian risiko, menerapkan sistem peringatan dini, mendirikan rencana evakuasi, meningkatkan ketahanan infrastruktur, dan meningkatkan kesadaran wisatawan dan penduduk setempat tentang bahaya potensial dan langkah-langkah keamanan (Bhattacharya & Nakamura, 2021).

Dengan memahami risiko khusus yang terkait dengan lokasi dan menerapkan langkah-langkah yang tepat, Tanjung Lesung dapat berusaha menyediakan pengalaman yang aman dan menyenangkan bagi wisatawan sambil juga memastikan keberlanjutan jangka panjang dan ketahanan destinasi tersebut. Sehingga, dalam melakukan manajemen bencana di KEK Tanjung Lesung, penelitian ini akan berfokus pada tiga tahap dalam penanggulangan bencana diantaranya pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

Tahap Pra Bencana

Tujuan utama dari rencana mitigasi adalah meningkatkan kesadaran bahwa pembangunan wilayah pariwisata, terutama destinasi alam, harus memperhatikan upaya mitigasi bencana. Tanpa mitigasi yang tepat, perkembangan kawasan pariwisata dapat meningkatkan risiko, potensi kerugian, dan jumlah korban akibat bencana di masa depan (Kemenparekraf, 2021). Oleh karena itu, perencanaan tata ruang memainkan peran penting dalam

mengelola dan mengurangi risiko bencana, dan setiap wilayah pariwisata harus mengadopsi strategi pengembangan yang tangguh terhadap bencana. Langkah-langkah struktural seperti pemasangan tanda-tanda evakuasi, pendirian pos keamanan, penggunaan sistem peringatan dini, serta pengembangan rute evakuasi dan bangunan yang tahan bencana adalah indikator bahwa destinasi pariwisata telah menerapkan mitigasi yang efektif. Selain itu, ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan apotek juga menunjukkan komitmen dalam melindungi pengunjung dan masyarakat setempat. Dengan melaksanakan rencana mitigasi secara komprehensif dan melibatkan semua pihak terkait, diharapkan wilayah pariwisata dapat menjadi tempat yang aman dan tangguh bencana sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat dalam menghadapi potensi bencana (Stefanie & Puspita, 2021).

Kesiapan dalam menghadapi bencana melibatkan kesadaran dan kemampuan untuk mencegah dan menangani korban bencana alam. Selain itu, dalam persiapan di daerah wisata diperlukan adanya fasilitas yang dapat menghadapi bencana yang terjadi. Penyediaan dan pengaturan infrastruktur pariwisata, termasuk lokasi wisata, membutuhkan perhatian yang serius. Perencanaan dan pengaturan yang baik untuk daerah wisata dapat mengurangi kerugian jiwa dan harta saat terjadi bencana. Perencanaan dan pengaturan yang didasarkan pada upaya pencegahan bencana alam akan sangat membantu dalam menghindari terjadinya lebih banyak korban saat bencana alam terjadi (Apriyani, 2020).

Selain itu, ada juga langkah-langkah mitigasi non-struktural yang

melibatkan peningkatan kapasitas masyarakat, pemanfaatan kearifan lokal, sertifikasi pemandu wisata, sertifikasi tim penyelamat, sertifikasi kesiapsiagaan bencana, serta pembentukan tim manajemen darurat dengan prosedur operasional standar yang telah ditetapkan. Selain itu, penting juga untuk mengupdate informasi secara berkala mengenai aktivitas bencana, menjalin koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan antara kabupaten/kota di sekitar wilayah tersebut untuk mengorganisasi langkah-langkah yang tepat guna dalam mengantisipasi bencana ekologis yang mungkin terjadi di destinasi wisata tersebut.

Dengan demikian, langkah-langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi bencana, memanfaatkan pengetahuan lokal yang ada, serta memastikan bahwa pemandu wisata dan tim penyelamat memiliki kompetensi yang terverifikasi. Selain itu, pembentukan tim manajemen darurat dan adopsi SOP yang jelas dapat memastikan respons yang cepat dan efektif dalam situasi darurat. Melalui informasi yang terus diperbarui dan kerjasama antar pemerintah daerah di sekitar wilayah, langkah-langkah ini bertujuan untuk mengorganisir upaya yang tepat guna dalam menghadapi ancaman bencana ekologis yang dapat mempengaruhi destinasi pariwisata tersebut (Wulung, 2020).

Penyusunan tata ruang yang baik sangat bergantung pada adanya peraturan yang mendukung. Kebijakan yang baik dapat memberikan persiapan dan posisi yang optimal bagi personel dan destinasi wisata ketika menghadapi bencana alam yang tiba-tiba, berantakan, dan tidak dapat diprediksi (Dyahati et al., 2020).

Mengacu pada kejadian dan dampak Tsunami 2018 di wilayah pariwisata pesisir Banten, terutama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, penelitian ini berfokus pada upaya mitigasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, terutama oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang sebelum Tsunami melanda KEK Tanjung Lesung (Haniah & Setiawati, 2022). Hal ini penting karena KEK Tanjung Lesung telah diresmikan sebagai salah satu destinasi "Bali baru" oleh Pemerintah Indonesia (Ilham A Hamudy & Saidi Rifki, 2021). Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan untuk penanggulangan bencana di masa depan.

Terdapat upaya mitigasi bencana yang telah dilakukan melalui kerjasama antara Dinas Pariwisata Provinsi Banten, BNPB, terutama BPBD Kabupaten Pandeglang. Berikut ini merupakan analisis mengenai upaya mitigasi bencana di Provinsi Banten, khususnya di KEK Tanjung Lesung sebelum terjadinya tsunami pada tahun 2018 berdasarkan pada aksi HFA (De Angeli et al., 2022) (Puspita, 2021): *Pertama*, Berdasarkan HFA (*Hyogo Framework for Action*) pada tahun 2005, pengamanan risiko bencana diutamakan secara domestik dan lokal dengan pondasi kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya. Pada tahun 2018, Provinsi Banten mengalami tsunami yang menunjukkan kurangnya kebijakan khusus dalam pencegahan dan penanganan bencana di wilayah tersebut. Penanganan bencana masih mengacu pada ketentuan nasional tanpa mempertimbangkan kekhasan budaya dan pariwisata di Provinsi Banten.

Kedua, berdasarkan HFA (*Hyogo Framework for Action*) tahun 2005, penting untuk mengenali, memprediksi, dan memantau risiko-risiko bencana serta meningkatkan peringatan dini. Meskipun pemantauan risiko bencana telah dilakukan di KEK Tanjung Lesung, kegiatan ini belum optimal karena minimnya papan penanda evakuasi dan kurang terpeliharanya papan tersebut. Hal ini menyebabkan kebingungan wisatawan saat terjadi tsunami. *Ketiga*, HFA (*Hyogo Framework for Action*) tahun 2005, penting untuk memanfaatkan literasi, inovasi terbaru, dan pembelajaran agar dapat membentuk budaya yang fokus pada keselamatan dan ketahanan di semua tingkatan. Sosialisasi tentang penanganan bencana telah dilakukan kepada masyarakat sebelum tsunami, namun belum optimal karena masyarakat belum menguasai SOP dalam penanganan bencana di daerah pariwisata. Pemahaman terkait pencegahan bencana juga belum tertuang dalam data yang ada di website desa Tanjungjaya.

Keempat, HFA (*Hyogo Framework for Action*) tahun 2005, salah satu area yang perlu ditingkatkan adalah kesiapan dalam penanganan bencana untuk mencapai respons yang efektif di semua tingkatan. Dinas Pariwisata bekerja sama dengan BPBD telah melakukan sosialisasi terkait pencegahan dan penanganan bencana di kawasan wisata, kelurahan, dan sekolah. Pembuatan Desa Tangguh Bencana melibatkan berbagai pihak dengan tujuan meningkatkan keahlian masyarakat yang mengalami bencana dan kolaborasi antarlembaga untuk mendukung upaya penguatan Desa Tangguh.

Secara keseluruhan, upaya menciptakan budaya keselamatan dan

ketahanan di Provinsi Banten, khususnya di KEK Tanjung Lesung, masih perlu ditingkatkan dalam hal kebijakan khusus, pemantauan risiko bencana, pemahaman masyarakat, dan kesiapan penanganan bencana.

Tahap Saat Bencana

Tsunami yang terjadi di Selat Sunda pada tanggal 22 Desember 2018 menyebabkan dampak yang serius. Menurut laporan dari Pos Komando BNPB pada tanggal 24 Desember 2018 pukul 07.00 WIB, tercatat 281 orang meninggal dunia, 1.016 orang terluka, 57 orang hilang, dan 11.687 warga mengungsi akibat bencana ini. Selain itu, kerusakan fisik juga terjadi dengan mencakup 611 unit rumah, 69 unit hotel-villa, 60 warung-toko, dan 420 perahu-kapal yang rusak (Wulung, 2020). Wilayah yang terkena dampak tsunami meliputi lima kabupaten, yaitu Pandeglang, Serang, Lampung Selatan, Tanggamus, dan Pesawaran. Di antara kabupaten-kabupaten tersebut, Kabupaten Pandeglang mengalami kerusakan yang paling parah, terutama di wilayah pesisir seperti Carita, Panimbang, Teluk Lada, Sumur, dan Tanjung Lesung (Yuliani, 2018).

Data ini mencerminkan tingkat dampak yang signifikan akibat tsunami di Selat Sunda. Dalam menghadapi situasi darurat ini, diperlukan upaya serius seperti evakuasi korban, pemberian perawatan kesehatan, penanganan pengungsi, dan pemulihan infrastruktur yang rusak. Data ini juga menjadi dasar penting dalam perencanaan pemulihan dan upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana serupa di masa depan.

Dalam upaya mengurangi jumlah korban, ribuan personel dari berbagai instansi seperti TNI, Polri, BNPB, Basarnas, Departemen PUPR, Departemen Sosial, Departemen

Kesehatan, Departemen ESDM, BPBD, SKPD, NGO, sukarelawan, dan masyarakat umum terlibat secara serius (Kabar Bisnis, 2018). Kepala Wilayah di setiap wilayah terdampak memimpin penanganan ini. Evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban terus dilakukan, dengan fokus pada penemuan korban yang mungkin terperangkap di bawah reruntuhan bangunan atau material yang terbawa tsunami. Pos-pos kesehatan, dapur umum, dan tempat pengungsian didirikan di beberapa lokasi (Putri Widya Oktarini & Gayatri Atmadi, 2020).

Dalam memenuhi kebutuhan darurat, logistik terus didistribusikan. Untuk pemindahan material, digunakan 7 unit excavator, 12 unit dump truck, dan 2 unit loader. Dalam mobilisasi ke lokasi bencana, melibatkan 1 unit excavator, 1 dozer, 1 loader, 1 grader, 2 tronton, dan 4 dump truck. Mengingat luasnya wilayah terdampak, peralatan berat dan personel tambahan diperlukan untuk membantu dalam pemindahan, pencarian, dan penyelamatan korban. BNPB juga dengan cepat membentuk posko bencana, menyediakan tenda, dapur umum, pakaian, selimut, popok, serta mendirikan posko kesehatan untuk memberikan bantuan kepada korban (BBC, 2018).

Upaya ini mencerminkan seriusnya dan koordinasi yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam menangani bencana tersebut. Dalam situasi darurat seperti ini, partisipasi dan kerjasama lintas sektor sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif dan memberikan bantuan kepada korban.

Tahap Pasca Bencana

Tujuan dari pemulihan pascabencana di Kabupaten Pandeglang adalah untuk mengembalikan kondisi sosial dan ekonomi serta mengurangi risiko

bencana di masa depan (Hartono, 2022). Dalam aspek sosial, pemulihan di Tanjung Lesung dapat dikatakan cukup berhasil. Ini disebabkan oleh kegigihan pemerintah daerah dan masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan dengan cepat. Namun, dalam subsektor kelembagaan sosial dan sosial budaya, proses pemulihan membutuhkan waktu yang lebih lama. Relokasi masyarakat ke hunian sementara merupakan bagian yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelaraskan pemikiran, budaya, dan kepemimpinan yang baru. Terutama jika masyarakat sangat terikat dengan pemimpin mereka, hal ini dapat menyebabkan munculnya ego di antara individu-individu.

Kerusakan dan kehancuran di bidang sosial dapat menyebabkan munculnya risiko bencana baru jika tidak ditangani dengan efektif. Strategi pemulihan ini diterapkan selama masa tanggap darurat selama 14 hari. Prioritas pertama adalah pemulihan sumber daya manusia (SDM) dan lembaga melalui kegiatan pemulihan trauma bagi penduduk yang tinggal dan bekerja di destinasi wisata, termasuk para pekerja di sektor industri pariwisata seperti hotel, komunitas, dan industri pariwisata itu sendiri. Pemulihan ekonomi dan pembangunan segera dilakukan dengan memberikan dana stimulus modal bagi masyarakat yang terdampak, seperti sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata. Di sisi lain, sektor pembangunan perlu segera merekonstruksi bangunan-bangunan yang terkena dampak tsunami. Dalam sektor pariwisata, pemulihan harus dilakukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan pemulihan khusus untuk anak-anak yang mengalami trauma pasca tsunami. Pemerintah dan Badan

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga melaksanakan program penanaman mangrove di sekitar pesisir dan menanam 400 tanaman untuk memperkuat penghalang alami di pantai Tanjung Lesung (Sintya Nida et al., 2022).

KESIMPULAN

Dalam melakukan manajemen bencana di Tanjung Lesung, BNPB membagi manajemen bencana dalam tiga tahap, yaitu pra-bencana, saat-bencana serta pasca bencana. pada saat pra-bencana, pihak BPBD Pandeglang telah melakukan mitigasi structural dan non-struktural untuk mengurangi dampak bencana namun belum terlalu maksimal. Pada tahap saat-bencana, BNPB dan BPBD Pandeglang melakukan evakuasi korban dengan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk membantu korban terdampak. Pada tahap pasca-bencana, BNPB dan BPBD Pandeglang melakukan rekonstruksi dan pemulihan dengan berfokus pada pemulihan ekonomi. Besarnya potensi bencana alam di Indonesia sudah sepatutnya membuat pemerintah sadar untuk mengambil Langkah preventif yang dicanangkan *Hyogo Framework for Action* (HFA) untuk mulai berfokus pada saat sebelum terjadi bencana untuk mengurangi dampak dari kejadian bencana. Bencana Tsunami selat sunda menjadi salah contoh belum berhasilnya BPBD dalam menerapkan konsep siaga bencana. Tidak terdapatnya standar operasional prosedur tsunami menjadi pemicu terbesar munculnya banyak korban. Pencegahan bencana khususnya tsunami bertujuan untuk keselamatan serta keamanan bagi wisatawan dan warga sekitar yang pada akhirnya memberikan kelangsungan ekonomi dikawasan pariwisata Tanjung Lesung.

REFERENSI

- Ady, Nina Nurrahmah, Ervita Kurnia Sari, & Achmad Andi Rif'an. (2020). Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Tanjung Lesung Sebagai Destinasi Prioritas yang Rawan Bencana. *Jurnal ALTASIA*.
- Apriyani, L. N. A. Y. F. (2020). Peran Stakeholders Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tsunami Selat Sunda di Provinsi Lampung Tahun 2018. *SIMBUR CAHAYA*, 176–187.
- Bani Adi Darma. (2019). PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS MARITIM DI PROVINSI BANTEN. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1), 73–96.
- BBC. (2018, December 22). *Tsunami Selat Sunda: Korban tewas 430 orang, Krakatau jadi "siaga", hujan abu di beberapa tempat*. <https://www.bbc.com/indonesia/live/indonesia-46663949>.
- Bhattacharya, Y., & Nakamura, H. (2021). Spatial hedonic analysis to support tourism-sensitive tsunami mitigation planning. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 60, 102283. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102283>
- Council, W. T. (2018). *TRAVEL & TOURISM GLOBAL ECONOMIC IMPACT & ISSUES 2018*. World Travel And Tourism Council.
- De Angeli, S., Malamud, B. D., Rossi, L., Taylor, F. E., Trasforini, E., & Rudari, R. (2022). A multi-hazard framework for spatial-temporal impact analysis. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 73, 102829. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.102829>
- Dyahati, D. B., Syaufina, L., & Sunkar, A. (2020). Disaster-Aware Tourist Development Strategy in Puncak Areas Bogor District West Java Province. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 10(4), 639–649. <https://doi.org/10.29244/jpsl.10.4.639-649>
- Faulkner, B., & Vikulov, S. (2001). Katherine, washed out one day, back on track the next: a post-mortem of a tourism disaster. *Tourism Management*, 22(4), 331–344. [https://doi.org/10.1016/S0261-5177\(00\)00069-8](https://doi.org/10.1016/S0261-5177(00)00069-8)
- Haniah, N., & Setiawati, S. D. (2022). Analisis Festival Tanjung Lesung dalam Upaya Meningkatkan Wisatawan Pasca Tsunami. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 5(2), 428–434. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i2.4314>
- Hartono, D. M. S. S. D. A. P. W. W. (2022). PEMULIHAN SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT TERDAMPAK

- TSUNAMI DI KABUPATEN PANDEGLANG UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN. *Jurnal Manajemen Bencana*, 119–132.
- Ilham A Hamudy, Moh., & Saidi Rifki, M. (2021). Tanjung Lesung Special Economic Zone: Expectation and Reality. *Policy & Governance Review*, 5(1), 50. <https://doi.org/10.30589/pgr.v5i1.337>
- Iwan Sugiwa. (2014). Profil Obyek Dan Tujuan Wisata (ODTW) di Provinsi Banten Dan Daya Tariknya Terhadap Wisatawan. *Epigram*, 102–109.
- Kabar Bisnis. (2018, December 24). *Data terbaru tsunami Banten, 281 korban meninggal dan belasan ribu mengungsi*. <https://Kabarbisnis.Com/Read/2888473/Data-Terbaru-Tsunami-Banten-281-Korban-Meninggal-Dan-Belasan-Ribu-Mengungsi>.
- Kemenparekraf. (2021, February 26). *Mewaspada Bencana di Destinasi Wisata*. <https://www.kemenparekraf.go.id/Rumah-Difabel/Mewaspada-Bencana-Di-Destinasi-Wisata>.
- Lee, Y., & Harrald, J. R. (1999). Critical issue for business area impact analysis in business crisis management: analytical capability. *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, 8(3), 184–189. <https://doi.org/10.1108/09653569910275382>
- Nabella, Syamsunnasir, & I Dewa Ketut Kerta Widana. (2022). Analisis Faktor Penyebab dan Strategi Mitigasi Bencana Banjir Rob di Kota Banda Aceh. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7337–7342.
- Nasir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Puspita, N. Y. (2021). Mitigasi Bencana Alam di Kek Tanjung Lesung, Sudahkah Hyogo Framework for Action Diterapkan? *Kosmik Hukum*, 21(2), 1. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i2.9730>
- Putri Widya Oktarini, & Gayatri Atmadi. (2020). Manajemen Krisis Destinasi Wisata Pasca Bencana Tsunami Selat Sunda oleh Humas Pemerintah. *EDUTOURISM Journal Of Tourism Research*, 2(02), 28–38. <https://doi.org/10.53050/ejtr.v2i02.136>
- Rachman, N. A., & Syamsudin, S. (2019). ANALISIS PERSEPSI DAN KESIAPAN MASYARAKAT PANDEGLANG DALAM MENGHADAPI PELAKSANAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) ZONA PARIWISATA TANJUNG LESUNG. *Sains Manajemen*, 4(2).

- <https://doi.org/10.30656/sm.v4i2.843>
- Ritchie, B. (2008). Tourism Disaster Planning and Management: From Response and Recovery to Reduction and Readiness. *Current Issues in Tourism*, 11(4), 315–348. <https://doi.org/10.1080/13683500802140372>
- Sintya Nida, H., Sukana, M., & Narottama, N. (2022). Manajemen Krisis di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung Pasca Tsunami Selat Sunda tahun 2018. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 19–31.
- Stefanie, K., & Puspita, N. Y. (2021). Uji Reliabilitas Sendai Framework for Disaster Risk Reduction Dalam Rehabilitasi Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art10>
- Suppasri, A., Maly, E., Kitamura, M., Syamsidik, Pescaroli, G., Alexander, D., & Imamura, F. (2021). Cascading disasters triggered by tsunami hazards: A perspective for critical infrastructure resilience and disaster risk reduction. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 66, 102597. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102597>
- Suroso. (2017). ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO (TNGGP) JAWA BARAT. *Jurnal Bina Akuntansi*, 4(2), 44–81.
- Sutrisnawati, N. K. (2018). DAMPAK BENCANA ALAM BAGI SEKTOR PARIWISATA DI BALI. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 9(1), 57–66. <https://doi.org/10.22334/jihm.v9i1.144>
- Suwantoro, G. (2013). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Andi.
- Uekusa, S., & Matthewman, S. (2023). Preparing multilingual disaster communication for the crises of tomorrow: A conceptual discussion. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 87, 103589. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2023.103589>
- Wulung, S. R. P. A. C. U. (2020). UPAYA MITIGASI PASCA TSUNAMI DI DESTINASI PARIWISATA. *Media Bina Ilmiah*, 2883–2894.
- Yuliani, P. A. (2018, December 24). *Kabar Terkini, 281 Meninggal Akibat Tsunami Selat Sunda*. <https://mediaindonesia.com/Nusantara/206215/Kabar-Terkini-281-Meninggal-Akibat-Tsunami-Selat-Sunda>.